

Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu

Infrastructure Development Strategy Urban Settlement Area, Belopa City, Luwu District

Indrajaya^{*1}, Rusida², Andi Fathussalam Baharuddin¹

*Email: indrajaya1067@gmail.com

¹Fakultas Teknik, Universitas Andi Djemma Palopo

²Fakultas Pertanian, Universitas Andi Djemma Palopo

Diterima: 10 Januari 2022 / Disetujui: 20 April 2022

ABSTRAK

Hasil analisis Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu dititik beratkan pada pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan ketersediaan lahan untuk pembangunan, reklamasi lahan dan rekayasa teknologi dalam kerangka mendukung pengembangan kawasan permukiman perkotaan, optimalisasi dan normalisasi sistem jaringan drainase dalam kerangka pengendalian ancaman banjir, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan lahan untuk kebutuhan pengelolaan air limbah perkotaan, pengembangan kawasan perkotaan Kabupaten Luwu yang bersinergi dengan pengembangan wilayah utara Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan jaringan jalan lingkungan untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk dan optimalisasi sistem distribusi pelayanan air untuk kebutuhan pertanian yang diikuti pengendalian pengembangan kawasan permukiman yang bersentuhan langsung dengan pasang surut air laut.

Kata Kunci: Pembangunan Infrstruktur, Kawasan Perkotaan, Belopa

ABSTRACT

The results of the analysis of the Infrastructure Development Strategy for Urban Settlement Areas in Belopa City, Luwu Regency, emphasize the development of settlements and urban infrastructure that are integrated with the availability of land for development, land reclamation and technology engineering in the framework of supporting the development of urban settlement areas, optimization and normalization of the drainage network system within the control framework. the threat of flooding, the effectiveness and efficiency of land use for urban wastewater management needs, the development of the urban area of Luwu Regency in synergy with the development of the northern region of South Sulawesi Province, the improvement of the environmental road network to facilitate accessibility and mobility of the population and optimization of the distribution system of water services for agricultural needs. followed by controlling the development of residential areas that are in direct contact with the tides of sea water.

Keywords: Infrastructure Development, Urban Area, Belopa



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Fenomena pembangunan kota saat ini secara umum menunjukkan adanya ketimpangan dalam berbagai wujud pembangunan fisik pada kebanyakan kota-

kota di Indonesia, termasuk kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Luwu dan secara khusus pada kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa, hal ini disebabkan belum adanya pemikiran terpadu

di dalam perumusan konsep penanganan dan pengembangan, utamanya unsur-unsur pembentuk fisik kota. Ketimpangan ini terutama disebabkan belum adanya tindakan pelaksanaan pembangunan kota yang didasarkan pada suatu wawasan perencanaan dan perancangan kota secara terpadu dengan menggunakan pendekatan “*Urban Design*”.

Pembangunan perkotaan kaitannya dengan penyiapan infrastruktur akan selalu berjalan sejajar dengan dinamika perkembangan dan penambahan jumlah penduduk. Kondisi ini umumnya terjadi pada kota-kota utama atau kota besar yang mengalami perkembangan sangat cepat dan signifikan. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan akan penyediaan infrastruktur. Dengan demikian diidentifikasi masalah infrastruktur pada kawasan permukiman perkotaan, semakin hari semakin kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, antara lain; perpindahan penduduk dari perdesaan ke daerah perkotaan dan pengaruh ekonomi global. Faktor penyebab eksternal yang paling menonjol di perkotaan adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk yang didominasi oleh perpindahan penduduk dari perdesaan

ke perkotaan (migrasi desa kota) akibat faktor daya tarik perkotaan.

Fenomena pembangunan kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu, diduga akibat tuntutan pembangunan yang cukup tinggi, sehingga mempengaruhi perkembangan fisik spasial kawasan permukiman perkotaan secara umum. Perkembangan fisik spasial tersebut, diyakini merupakan pemicu munculnya permasalahan lingkungan, baik lingkungan biotik, abiotik, sosial, kultural dan ekonomi, yang sangat terkait dengan berkembangnya kawasan permukiman kumuh dan kawasan permukiman baru yang berskala besar serta proses perkembangannya secara umum terjadi pada kawasan utama (inti) Kota Belopa. Perkembangan kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu pada dasarnya dapat digolongkan atas dua kategori, yaitu: (a) kawasan permukiman yang berkembang akibat faktor historis tanpa melalui mekanisme perencanaan, dan (b) kawasan permukiman yang berkembang karena diciptakan melalui suatu prosedur tertentu dalam kerangka pemenuhan kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat Kota Belopa Kabupaten Luwu.

Kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu secara umum diidentifikasi memiliki keterbatasan jika

ditinjau dari segi aspek fisik, terutama penyiapan lahan untuk berbagai kegiatan aktivitas sosial ekonomi perkotaan. Pengembangan potensi fisik kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu perlu untuk dioptimalkan dengan merangsang pertumbuhan kawasan permukiman khususnya yang bersentuhan langsung dengan kawasan ekonomi strategis yang memiliki potensi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan perkembangan kawasan perkotaan lainnya, sehingga program pembangunan dapat dimaksimalkan sesuai karakteristik dan dinamika perkembangan kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu yang sedang berlangsung.

Pertambahan jumlah penduduk pada kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa berdampak pada peningkatan kebutuhan ruang untuk berbagai aktivitas perkotaan lainnya, pada sisi lain dukungan infrastruktur belum terselenggara secara maksimal. Kondisi tersebut mendorong perkembangan kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa yang berlangsung, cenderung sporadis dan kumuh. Indikasi permasalahan dalam perkembangan kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa yang dapat diamati, antara lain: (1) alih fungsi guna lahan kawasan perkotaan utamanya pada kawasan sepanjang koridor

jalan Trans Sulawesi; (2) perkembangan permukiman kumuh pada muara sungai dan wilayah pesisir cenderung tak terkendali; (3) degradasi fisik lingkungan pada daerah aliran sungai dan wilayah pesisir; (4) tingkat pelayanan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa belum memadai.

Selain permasalahan yang disebutkan di atas, mengindikasikan bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa saat ini diidentifikasi belum terintegrasi dengan perangkat kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan normatif. Dengan demikian melalui upaya sinergitas dan sinkronisasi berbagai perangkat kebijakan pembangunan, khususnya dalam konteks implementasi program-program pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa, diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan infrastruktur yang layak, sehat dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka jenis penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu yang meliputi 2 (dua) kecamatan, yakni : Kecamatan Belopa dan Belopa Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa memerlukan penanganan pembangunan infrastruktur yang mendesak.

2. Sumber Data

Data yang digunakan berupa data dokumentasi kinerja bidang infrastruktur melalui Dinas Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Luwu. Data ini diperoleh dari instansi terkait yang relevan serta pustaka yang mendukung penelitian ini. Selain data sekunder akan diambil pula data primer dari hasil wawancara dengan pejabat-pejabat lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pejabat yang berwenang. Data ini berupa informasi kebijakan-kebijakan

untuk mendukung pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengetahui aspek kekuatan (*strength*), aspek kelemahan (*weeknees*), aspek ancaman (*threat*) dan aspek peluang (*opportunity*) dalam pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu. Analisis SWOT mempunyai formulasi seperti pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Matriks SWOT

	EXTERNAL FAKTOR		
	Opportunity (O)	Threat (T)	
INTERNAL FAKTOR	Identification of Factor	Tentukan Faktor-Faktor Peluang	Tentukan Ancaman Faktor-Faktor
	Strength (S)	S Vs T	
	Tentukan Faktor-Faktor Kekuatan	Tentukan Program Yang Muncul Dengan Mempertemukan Kekuatan (S) Dengan Peluang (O)	Tentukan Program Yang Muncul Dengan Mempertemukan Kekuatan (S) Dengan Ancaman (T)
	Weakness (W)	W Vs T	
	Tentukan Faktor-Faktor Kelemahan	Tentukan Program Yang Muncul Dengan Mempertemukan Kelemahan (W) Dengan Peluang (O)	Tentukan Program Yang Muncul Dengan Mempertemukan Kelemahan (W) Dengan Ancaman (T)

Sumber : Freddy Rangkuti, 2008

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode SWOT digunakan untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

1. Strategi Aspek Peluang dan Kekuatan

a. Pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan ketersediaan lahan untuk pembangunan

- b. Pengembangan kawasan perkotaan sesuai daya dukung lingkungan
 - c. Pengendalian kawasan pesisir dalam kerangka mendukung pengembangan kawasan fungsional strategis perkotaan
 - d. Pengembangan dan pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan permukiman dan sentra-sentra ekonomi produksi
 - e. Pengembangan sistem jaringan drainase kawasan perkotaan yang terintegrasi
- 2. Strategi Aspek Peluang dan Kelemahan**
- a. Reklamasi lahan dan rekayasa teknologi dalam kerangka mendukung pengembangan kawasan permukiman perkotaan
 - b. Optimalisasi pemanfaatan lahan dalam kerangka mendukung peningkatan status kota dari PKL menjadi PKW
 - c. Penataan daerah pasang surut dan bantaran sungai yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan fungsional strategis perkotaan
 - d. Pengembangan jalan baru sebagai jalur alternatif menuju kawasan perkotaan
 - e. Optimalisasi dan normalisasi sistem jaringan drainase dalam kerangka pengendalian ancaman banjir
- 3. Strategi Aspek Ancaman dan Kekuatan**
- a. Pengembangan kawasan perkotaan yang diikuti pengendalian alih fungsi guna lahan pertanian secara intensif
 - b. Penataan kawasan perkotaan dalam kerangka mendukung produktivitas sosial ekonomi
 - c. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan DAS
 - d. Peningkatan kapasitas badan jalan kawasan permukiman perkotaan
 - e. Peningkatan sistem jaringan drainase kawasan perkotaan
- 4. Strategi Aspek Ancaman dan Kelemahan**
- a. Pengendalian alih fungsi guna lahan yang diikuti peningkatan intensifikasi lahan pertanian
 - b. Pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang diikuti peningkatan daya saing, produktivitas dan aktivitas sosial ekonomi
 - c. Pengendalian daerah pasang surut dan bantaran sungai yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan
 - d. Peningkatan jaringan jalan lingkungan untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk

- e. Pembangunan sistem jaringan drainase sesuai hirarkinya

Untuk mencapai maksud tersebut, upaya yang dilakukan adalah mengarahkan pengembangan fisik kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Matriks Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu dapat dilihat pada penjelasan Tabel 2. Sedangkan strategi umum penanganan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa

Kebijakan pengembangan infrastruktur sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas jaringan jalan untuk mendukung aktivitas dan kegiatan penduduk kawasan perkotaan Kota Belopa
- b. Peningkatan kualitas sistem pengelolaan prasarana persampahan untuk mendukung kebersihan kawasan perkotaan Kota Belopa
- c. Pengembangan sistem penyediaan air minum untuk mendukung aktivitas kawasan perkotaan Kota Belopa

- d. Pembangunan sistem drainase yang berhirarki pada kawasan perkotaan Kota Belopa

- e. Penyediaan sanitasi untuk peningkatan kualitas lingkungan kawasan perkotaan Kota Belopa

- f. Penyiapan SDM yang memadai dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perkotaan Kota Belopa

2. Strategi Peningkatan Kelestarian Fungsi Lingkungan

Strategi yang dapat ditempuh untuk mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pemahaman fungsi ekosistem lingkungan pada kawasan perkotaan Kota Belopa
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan besarnya manfaat dan fungsi lingkungan sebagai modal dasar pembangunan di kawasan perkotaan Kota Belopa
- c. Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan sebagai produk perangkat hukum di lapangan pada kawasan perkotaan Kota Belopa

3. Strategi Pengelolaan Lingkungan

Strategi dasar pengelolaan lingkungan hidup yang akan dikembangkan adalah

bagaiman memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkesinambungan, dengan tetap memelihara kelestariannya. Strategi ini dapat dicapai melalui pengembangan berbagai kebijakan yang akan diterapkan pada berbagai sektor pembangunan. Secara umum, kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikembangkan melalui beberapa opsi seagai berikut; kebijakan regulasi, kebijakan program/proyek dan kebijakan kelembagaan

a. Kebijakan Regulasi

Kebijakan regulasi (pengaturan) melalui peraturan perundang-undangan menunjuk kepada instrumen yang ditegaskan pemerintah bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ekosistem oleh pengguna. Instrumen ini antara lain dapat digunakan dalam:

- 1) Pengendalian zonasi (seperti memetakan zona-zona yang berbeda, menjelaskan fungsi atau tujuan zona dan merinci kriteria teknis yang mendasari penetapan zona).
- 2) Pengendalian lingkungan (intervensi hutan lindung, penebangan hutan bakau).
- 3) Baku mutu
- 4) AMDAL, UKL, UPL, dan sebagainya
- 5) Taraf pencemaran
- 6) Pengelolaan limbah

- 7) Larangan perdagangan spesies (tertentu)

b. Kebijakan Program/Proyek

Kebijakan program atau proyek menunjuk pada kegiatan yang spesifik , dengan fokus pada kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk memperbaiki atau merubah praktek pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Kebijakan ini antara lain berupa proyek-proyek atau program-program:

- 1) Pengelolaan air, konsevasi lahan dan pengendalian erosi
- 2) Pengelolaan SDA
- 3) Pengelolaan lingkungan
- 4) Pelayanan penyuluhan dan pengembangan masyarakat

c. Kebijakan Kelembagaan

Kebijakan ekonomi menunjuk pada pilihan lain yang berhubungan langsung dengan invesatasi umum atau yang bertujuan untuk memperbaiki atau merubah kekuatan pasar untuk mempengaruhi perilaku. Instrumen ekonomi yang dapat digunakan antara lain; investasi langsung, insentif dan disinsentif.

Strategi khusus penanganan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pusat Informasi Untuk Layanan Publik

Pengembangan pusat informasi dan layanan publik ditujukan untuk memberikan

kemudahan akses kepada masyarakat dalam hal:

- a. Informasi tentang rencana tata ruang terhadap kawasan yang diizinkan dalam kegiatan pembangunan.
- b. Informasi yang terkait dengan penyediaan lahan (harga, lokasi dan status).
- c. Informasi tentang lokasi terlarang untuk dikembangkan antara lain; kawasan hutan lindung dan bantaran sungai.
- d. Informasi tentang ketersediaan sumber pembiayaan yang dapat diakses untuk setiap segmen masyarakat.
- e. Prosedur dan tata cara perizinan mendirikan bangunan baik kolektif maupun perorangan

2. Penyederhanaan dan Perampingan Prosedur Perizinan Pembangunan

Penyederhanaan dan perampingan prosedur perizinan pembangunan menyangkut:

- a. Jenis perizinan yang harus ditempuh dalam proses pembangunan.
- b. Tata cara pengajuan perizinan dan kelengkapannya.
- c. Waktu penyelesaian dan besaran pembiayaan.
- d. Instansi penunjang yang terkait dengan setiap izin.

3. Pengembangan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pengembangan tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam hal:

- a. Prinsip dasar pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi yang memberikan izin sebagai dasar pengawasan.
- b. Prosedur pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Kabupaten Luwu.
- c. Dilakukan dalam rangka tertib pembangunan serta pencapaian mutu konstruksi.
- d. Penetapan sanksi bagi pelanggaran dan pemberian insentif bagi pemberi manfaat yang diatur melalui peraturan daerah bagi setiap pelanggaran yang diduga akan terjadi

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu, tiga hal pokok yang perlu mendapat perhatian dan pengkajian lebih lanjut untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Administrasi dan Aparatur Pelaksanaan

Perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan pembangunan melibatkan banyak instansi dan berbagai bagian dan sektor. Kebijakan suatu instansi sering menimbulkan dampak atas instansi lainnya. Atas dasar itu, maka penting sekali adanya

komunikasi antar instansi mengenai informasi. Mekanisme komunikasi antarinstitusi yang baik untuk memberi peringatan secara dini kepada yang berkepentingan mengenai rencana-rencana instansi lainnya. Mekanisme harus didasarkan pada informasi yang jelas mengenai program dan proyek pembangunan, daripada sekedar pernyataan mengenai kebijaksanaan yang bersifat umum, dan program serta proyek yang harus diajukan untuk dibahas sebelum membuat suatu komitmen yang tegas. Perlu diperkenalkan suatu mekanisme koordinasi perencanaan yang terpadu. Suatu proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dengan menggunakan program-program yang berkesinambungan (*rolling plan*) selama beberapa tahun sebagai dasar suatu organisasi.

Dalam bidang administrasi biaya pembangunan dikembangkan suatu sistem keterpaduan program pelaksanaan yang efisien dan efektif. Hal ini berarti diperlukan suatu pedoman sebagai landasan, sejak dari proses pembangunan, pelaksanaan di lapangan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian pembangunan sampai pada tahap evaluasi sebagai umpan balik program pembangunan. Harus dihindari simpul-simpul birokrasi yang berkepanjangan. Selama periode perencanaan perlu diatur

mekanisme kewenangan yang lebih besar dari tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah. Terpusatnya proses pengambilan keputusan pada suatu simpul, tidak membantu percepatan pelaksanaan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Sebagai pendahuluan dari pelimpahan kewenangan, kemungkinan pengaturan pelaksanaan atas berbagai perangkat pemerintahan harus dijejaki. Cara ini akan memberikan manfaat ganda selain memperkuat kemampuan teknis peringkat yang lebih rendah melalui latihan bidang pekerjaan, juga memberi kesempatan kerja kepada perangkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai tujuan dan maksud perangkat yang lebih rendah, dan memperoleh keterangan yang lebih baik mengenai kemampuan mereka untuk mencapai tujuan pembangunan.

2. Pengelolaan Lingkungan

Pembinaan dan pengelolaan dan persoalan lingkungan dihadapkan kepada masalah pokok sebagai berikut :

- a. Perkembangan suatu kawasan perkotaan tidak sepenuhnya atas dasar potensi akan tetapi karena tuntutan fungsi secara regional maupun lokal. Hal ini akan berdampak pada terjadinya kesenjangan antara

kesempatan memenuhi tuntutan pembangunan dengan perkembangan aspirasi masyarakat.

- b. Kemampuan Pemda dan masyarakat yang terbatas dalam menunjang pembangunan, menimbulkan kecenderungan untuk memanfaatkan lahan dan potensi sumberdaya alam lain secara berlebihan. Kondisi ini kemudian kembali menjadi masalah bagi masyarakat dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

3. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Berhasilnya tidaknya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu akan sangat tergantung pada usaha pemerintah dan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan kondisi tersebut, perlu dihayati kegunaan dan manfaatnya, baik bagi Pemerintah Daerah, swasta, maupun oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih lagi menyangkut pengembangan fasilitas sosial ekonomi, seyogyanya dikembangkan pusat-pusat aktivitas baru untuk melayani beberapa kawasan yang dipersiapkan sebagai pusat kegiatan. Peran pemerintah dan masyarakat yang dimaksud sebagai berikut:

- a. **Yang bersifat langsung**, pemerintah menanamkan dana dan biaya untuk pembangunan infrastruktur yang

bersifat kepentingan umum sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan (jalan, jembatan, sekolah, pasar, terminal dan sebagainya). Ini berarti bahwa pemerintah harus pada posisi "memimpin" (*leading*).

- b. **Yang bersifat tidak langsung**, agar pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dapat menimbulkan rangsangan-rangsangan pembangunan lain sesuai dengan rencana maka perlu diambil langkah-langkah seperti; penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat, dan penyusunan/penyempurnaan peraturan-peraturan baik yang bersifat memberikan inisiatif (rangsangan) maupun bersifat menghambat/membatasi pembangunan oleh masyarakat.

Masyarakat baik melalui jalur formal maupun non formal terus ditingkatkan kesadaran akan hal dan tanggung jawabnya dan peran sertanya pada pembangunan atas dasar kebersamaan kepentingan serta tujuan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan ketersediaan lahan untuk pembangunan. Pengendalian kawasan

pesisir dalam kerangka mendukung pengembangan kawasan fungsional strategis perkotaan. Reklamasi lahan dan rekayasa teknologi dalam kerangka mendukung pengembangan kawasan permukiman perkotaan. Optimalisasi dan normalisasi sistem jaringan drainase dalam kerangka pengendalian ancaman banjir serta Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan lahan untuk kebutuhan pengelolaan air limbah perkotaan

Jasa, Infomatek volume 5 Nomor 3 September 2003, Bandung
 Tamin, Ofyar dan Frazila, 1997. *Penerapan Konsep Interaksi Tata Guna Lahan Sistem Transportasi Dalam Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi*. Dalam Jurnal PWK Vol. 8, No. 3.
 Warpani S. 1984. *Analisis Kota dan Daerah*. Institut Teknologi Bandung, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2007. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Seruni, Makassar
 Ambardi, U.M. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Kajian Konsep dan Pengembangan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta.
 Amien, Mappadjantji. 2002. *Penataan Ruang Untuk Pembangunan Wilayah*, Pusat Studi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Lembaga Penelitian UNHAS, Ujung Pandang.
 Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa Kota*. Ghalia Indonesia, Jakarta
 Djakapermana, R.D. 2010. *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*, Bogor : IPB Press
 Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
 Jhingan M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
 Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Mamadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta
 Rangkuti, Freddy. 2008. *Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
 Syarifudin L. 2003. *Studi Pemilihan Subsektor Jasa Unggulan Dalam Rangka Mendukung Kota Bandung Sebagai Kota*